

RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023 DISETUJUI JADI PERDA



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/riau/daerah/766434/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-disetujui-jadi-perda>

Pj Bupati Kampar Hambali SE.,MBA.,MH mengikuti rapat paripurna terkait laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Rabu (19/06/2024).

M.Faisal ST, yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. “Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2023 menjadi acuan penting untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran di tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya

Dalam rapat paripurna tersebut, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kampar Iib Nursaleh, S.Kom.MH memaparkan laporan mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan,” ungkap Ketua Badan Anggaran

Setelah mendengarkan laporan dari Badan Anggaran DPRD dan telah disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 , Pj Bupati Kampar Hambali dalam pidatonya menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

“Sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang persetujuan bersama terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diantaranya pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah berjumlah Rp.298 miliar lebih, Dana perimbangan berjumlah Rp.2,434 Triliun lebih dan yang lain pendapatan yang sah sekitar 2,1 miliar lebih dengan jumlah Pendapatan keseluruhan sekitar 2,734 Triliun lebih,” Ungkap Hambali

Selanjutnya Belanja, yang terdiri dari belanja operasi diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang berjumlah sekitar Rp. 1,900 triliun lebih. Kemudian belanja modal diantaranya belanja modal pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya dengan jumlah Rp. 324 miliar lebih.

Belanja tak terduga dengan jumlah Rp.66 juta lebih dan transfer terdiri dari transfer/bagi hasil ke desa dan transfer/bantuan keuangan dengan jumlah Rp.393 miliar lebih, dengan difisit Rp. 115 miliar. Penerimaan pembiayaan Rp. 21 miliar lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran berjumlah Rp. 137 miliar lebih.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/riau/daerah/766434/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-disetujui-jadi-perda>, 19/06/2024;
2. <https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3239/pj-bupati-kampar-ikuti-rapat-paripurna-laporan-banggar-dprd-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-tahun-anggaran-2023>, 19/07/2024;

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk

mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.